

Perubahan Iklim dan Peranan Lembaga Pelatihan dalam Aksi Iklim

Ajriani Munthe Salak

Lembaga Administrasi Negara

ajrianisalak@gmail.com

ABSTRACT

Climate change is an ongoing issue and has significantly impacted human life in the aspects of health, food, socio-culture, environment and global biodiversity. As one of the goals in sustainable development to combat climate change, well-planned climate actions are needed, green policies are needed, integrated climate action implementation and awareness and capacity building programs on climate change are needed. The Civil Servant and Training Institutions have an important role to play in realizing sustainable development. This paper describes the concept of sustainable development and the roles of ASN (Civil Servant) and Training Institutions to accelerate the achievement of the Sustainable Development Goals. From this paper, it is concluded that a new approach is needed in the management and implementation of current training so that it can answer the issue of climate change and the actions that can be taken at the Training Institute.

Keywords : *Sustainable Development, Climate Change, Climate Action and Training Institute*

I. PENDAHULUAN

Climate Action (Aksi Iklim) merupakan salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Perubahan iklim bukanlah isu baru bagi manusia. Sejak abad ke-16 filsuf Cina, Romawi dan Arab telah mengingatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keadilan sosial agar kehidupan dapat terus berlanjut. Padahal, pada waktu itu penduduk bumi tidak sebanyak saat ini, dan kondisi bumi terus mengalami eksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Pada tahun 1713 muncul istilah “*sustainability*” yang digunakan dalam praktik-praktik kehutanan di Jerman seperti yang disebutkan dalam *Sylvicultura Oeconomica*. Sejak itu, dunia terus membahas tentang perubahan iklim dalam kerangka pembangunan berkelanjutan karena begitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Selanjutnya, isu tentang pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian besar pada 1972 saat terjadinya Konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang *Human Environment*

(Lingkungan Manusia). Perbincangan dunia tentang perubahan iklim semakin menjadi penting sejak dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 (Meiviana, Sulistiowati dan Soejachmoen, 2004). Hadirnya agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan menandai semakin seriusnya isu pembangunan berkelanjutan. Jika cetak biru dalam agenda ini tidak dicapai dan penduduk bumi tidak memikirkan dan tidak melakukan cara-cara membangun yang lebih ramah lingkungan (lebih hijau), maka keberlanjutan kehidupan kita akan terancam.

Mengapa kita harus membahas perubahan iklim? Perubahan iklim bukanlah isu yang dibahas oleh akademisi, para pendidik di kelas dan para politikus untuk mendapatkan dukungan rakyat. Perubahan iklim adalah isu semua lapisan masyarakat dari petani sampai pebisnis dan merupakan bahan pembicaraan hampir setiap hari. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak besar bagi banyak negara dan banyak orang dalam berbagai aspek seperti kesehatan buruk, kekurangan pangan, perubahan sosial kultural, buruknya lingkungan dan hilangnya keanekaan hayati serta hancurnya papan yang sudah terbangun. Ia telah menjadi disrupti perekonomian, memengaruhi kehidupan dan memberi dampak besar pada tatanan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Untuk itu, diperlukan pemahaman yang kuat tentang Perubahan Iklim dan melakukan Aksi Perubahan Iklim yang terintegrasi melalui paradigma pembangunan rendah karbon (pro hijau) dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, telah muncul komitmen untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan agenda 2030 yang dituangkan dalam Peta Jalan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (Roadmap of SDGs Indonesia) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan lahirnya Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Peta jalan dan peraturan akan menjadi diskursus dan sebuah dokumen administratif jika tidak 'dibumikan'. Seperti sering diindikasikan selalu ada kesenjangan atau celah antar kebijakan dan penerapan. Dan, lembaga pendidikan dan pelatihan merupakan konektor yang dapat menjahit kesenjangan tersebut dan juga motor penggerak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat memainkan peran-peran strategisnya.

Peran lembaga pelatihan sangatlah strategis, mengingat saat ini Indonesia setidaknya memiliki 719 lembaga pelatihan yang telah tercatat dalam sistem informasi pengembangan kompetensi ASN (SIPKA) Lembaga Administrasi Negara. Lembaga-lembaga pelatihan ini (baca lembaga pengembangan kompetensi) memiliki sumber daya yang cukup untuk dapat menjadi sumber

pengetahuan, sumber daya manusia yang dapat menjadi *mentor* dan *coach* dalam penerapan pembangunan berkelanjutan, sumber anggaran dan memiliki jejaring nasional dan internasional yang dapat menjadi mitra kerja dalam penerapan kebijakan yang telah disusun. Namun, diindikasikan lembaga dan sumber daya lembaga pelatihan ini belum memainkan peranan strategisnya dalam mendorong dan mempercepat TPB khususnya dalam aksi iklim.

II. PEMBAHASAN

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tiga dekade terakhir, kita menyaksikan pembangunan fisik yang begitu masif, menurunnya jumlah lahan hijau secara signifikan, meningkatnya volume sampah yang luar biasa, meningkatkannya intensitas migrasi penduduk dari desa ke kota-kota (yang lebih menjanjikan), meningkatnya koneksi antar wilayah, meningkatnya jumlah variasi transportasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Kita menyaksikan banyaknya alih fungsi penggunaan lahan menjadi bangunan-bangun fisik yang menyebabkan hilangnya lahan hutan, pertanian bahkan perairan yang berujung pada meningkatnya suhu udara dan merubah karakteristik permukaan tanah (Mas'at, 2009). Dan, kita mencatat bahwa emisi rumah kaca akibat migrasi dan pemanfaatan alat transportasi dengan sumber daya fosil semakin tinggi dan sulit terkendali.

Perubahan iklim merupakan fenomena pemanasan global yang terjadi akibat meningkatnya gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan terjadi untuk jangka waktu tertentu. Perubahan iklim dapat terjadi disebabkan siklus alam, kejadian alam seperti terjadinya gunung meletus, gempa bumi dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Saat ini aktivitas manusia yang berkontribusi pada perubahan iklim. Revolusi teknologi yang diinisiasi dan dinikmati oleh manusia telah merubah pola konsumsi dan perilaku manusia terhadap alam. Manusia semakin kurang perhitungan dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi sumber energi fosil secara besar-besaran. Hampir seluruh kegiatan manusia menggunakan energi fosil ini dan menggunakan semua bahan alam yang baik di darat, sungai dan laut. Semakin maju ekonomi sebuah negara atau wilayah maka semakin banyak memerlukan dan menggantungkan kinerjanya dari energi dan sumber daya alam. Dari urusan rumah tangga, urusan kantor serta urusan sosial dari pagi sampai pagi lagi. Dan dari Senin ke Minggu dan terus sepanjang tahun. Kita mengetahui bahwa pemanfaatan energi fosil (saat

ia dibakar) akan mengeluarkan karbon dioksida. Dan jika terus-terusan digunakan akan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di udara. Hal inilah yang menyebabkan pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan (Woodward, 2008).

Yang mendasari terjadi dan bertumbuhnya ekonomi dunia, terbangunnya kesejahteraan dan dan terjaganya lingkungan yang sehat terletak pada bagaimana manusia mengekstrak dan memanfaatkan berbagai macam materi (*material world*) yang berasal dari bumi dan kembali ke bumi seperti kayu, mineral, minyak, bahan kimia, tanaman-tanaman pertanian, binatang, tanah dan batu. Dalam 50 tahun terakhir ini, manusia telah mengkonsumsi lebih banyak bahan-bahan dibanding abad-abad sebelumnya. Saat ini diperkirakan bahwa antara tahun 2000 sampai dengan 2050, penduduk dunia akan terus bertambah menjadi 50% dari jumlah penduduk sebelum tahun 2000, sedangkan aktivitas ekonomi dunia akan bertumbuh menjadi 500% dari sebelumnya, sedangkan pemanfaatan energi global dan pemanfaatan sumber-sumber daya material lainnya akan meningkat menjadi 300% (EPA, 2009). Peningkatan kuantitatif yang signifikan ini tentu akan memengaruhi daya dukung bumi sebagai pemberi jasa lingkungan bagi manusia.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa "Report of the UN Economist Network for 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our Time" disampaikan bahwa masyarakat global dalam waktu 75 tahun terakhir telah mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan menurunnya jumlah kemiskinan global, meningkatnya angka harapan hidup (UN, 2020) dan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor pelayanan publik. Kemajuan ini juga dirasakan di Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi meski cenderung fluktuatif telah memberikan kemampuan kita menjadi negara yang diperhitungkan dunia, angka literasi juga meningkat, usia panjang umur semakin baik dan terjadi perbaikan dalam pelayanan publik. Walau dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kita merangkak di 5% sebelum Covid-19 pada tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020 yang mengakibatkan terancamnya kestabilan ekonomi dan akan berefek pada meningkatnya jumlah orang kehilangan pekerjaan dan sumber ekonomi lainnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan fisik yang kita dapatkan memiliki harga yang lebih besar dimana kerusakan lingkungan semakin tinggi dan merata di seluruh dunia termasuk Indonesia dan ketidakadilan secara ekonomi muncul dimana-mana. Dan munculnya kemiskinan yang semakin tinggi diakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata.

Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang menunjukkan ketidakseimbangan di masyarakat yang mengakibatkan diferensiasi mencolok dalam penghasilan, ketidakadilan dalam status dan

kedudukan di masyarakat (Indomaritim, 29.10.2020). Terjadinya perubahan iklim akan memperdalam ketimpangan yang sudah ada. Hak-hak iklim yang dimiliki negara-negara yang belum maju dan orang-orang yang kurang mampu akan menjadi tersingkirkan. Bukankah pengeksploitasian lahan dan sumber daya alam lebih sering dilakukan negara dan orang yang memiliki modal besar? Diindikasi bahwa Amerika Serikat dan Cina merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dunia. Kenyataannya, pengambilan keputusan pembangunan global dan perang terhadap aksi iklim lebih berpihak pada negara seperti Amerika dan Cina dan pemilik modal. Dalam pertemuan-pertemuan internasional isu kepentingan negara-negara maju dalam perubahan iklim mewarnai dalam setiap negosiasi perubahan iklim (Koransulindo, 26.10.2016). Kemajuan ekonomi suatu negara, dapat memberikan dampak lingkungan negatif pada bangsa dan wilayah lain. Ini juga yang disampaikan oleh perdana menteri Bhutan, Tsering Tobgay pada 1 April 2016 yang disiarkan dalam acara TED (suatu kegiatan komunitas internasional berbagi) bahwa Bhutan menerima dampak perubahan iklim yang diakibatkan eksploitasi alam yang dilakukan oleh negara lain.

Selain isu perubahan iklim, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan ketidakpastian akan masa depan. Pasca Covid-19 dan konsekuensinya terhadap sosio-ekonomi akan membayangi kita semua. Dan diperkirakan sebanyak 40 juta orang di dunia akan menghadapi kemiskinan parah. Dan sekitar 1,6 juta masyarakat yang bekerja di sektor informal menghadapi risiko yang lebih tidak pasti dan banyak yang mengalami kurangnya akses terhadap proteksi sosial dalam berbagai bentuk. Kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (-3,49%) pada masa pandemi Covid-19 (Liputan6, 24.12. 2020). Adanya pembatasan sosial dan batasan pergerakan masyarakat akan berdampak pada stagnasi pertumbuhan ekonomi (Liu Zhenmin, UN Under-Secretary-General, 2020). Dari perspektif lingkungan, pandemi ini telah menjadi obat bagi lingkungan kita yang sedang 'sakit'. Dilaporkan pandemi Covid-19 telah memberikan 'perbaikan' lingkungan diakibatkan menurunnya mobilitas orang akibat pengucilan (*lockdown*) dan mengakibatkan menurunnya tingkat oksida nitrat yang merupakan polusi berbahaya yang dikeluarkan oleh lalu lalang moda transportasi yang ada. Italia dilaporkan menurun sampai 40% dan Cina mencapai 25% dibanding pada tahun 2019 (Kompas TV, 19.11. 2020). Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini melaporkan bahwa telah terjadi penurunan emisi di seluruh dunia walau tidak begitu signifikan (okezone.com, 12.12.2020).

Dengan kondisi yang dijelaskan di atas, dunia, khususnya Indonesia, harus memiliki paradigma dan pendekatan pembangunan yang berubah, pembangunan yang seimbangan dengan pilar ekonomi,

sosial dan lingkungan (pembangunan yang hijau). Diperlukan lapangan kerja hijau untuk sejumlah masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Isu keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial bukanlah isu yang mudah diselesaikan, karena dalam kenyataannya selalu ada yang dikorbankan dari tiga pilar ini. Saat ini semua setuju bahwa diperlukan cara membangun yang lebih baik lagi (*Building Back Better*), yang lebih memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan kepedulian sosial yang adil (tak ada seorang pun yang tertinggal---*no one left behind*). Diperlukan cara pandang dan pendekatan pembangunan yang baru yang meniadakan ketimpangan sosial. *Building Back Better* (BBB) menjadi suatu kata kunci dan juga sebuah seruan agar kita harus membangun kembali dari kondisi-kondisi saat ini dengan pendekatan dan strategi yang inovatif dan hijau. Menjadikan pembangunan untuk kesejahteraan semua orang, bukan milik segelintir elit, pembangunan yang memperhitungkan dengan cerdas dan efisien dalam pemanfaatan energi dan sumber yang kita dapatkan dari bumi (*world materials*) serta menggunakan teknologi dan inovasi yang ada untuk mengurangi dampak lingkungan yang merusak. *BBB is an approach to post disaster recovery that reduces vulnerability to future disasters and builds community resilience to address physical, social, environmental and economic vulnerabilities and shocks* (GFDRR, 2017)

ASN Untuk Aksi Iklim

Semua perubahan yang terjadi pada iklim tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh Peran yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara. Dan, risiko-risiko lingkungan yang telah terjadi menjadi tanggungjawab ASN untuk mengembalikannya menjadi lebih baik. Dalam Undang Undang ASN No. 5/2014 disebutkan bahwa ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemahaman yang kurang tentang pembangunan berkelanjutan dapat dideteksi dari banyaknya izin pembangunan dan ahli fungsi lahan yang tidak hijau, kasus korupsi yang dilakukan oleh ASN di sektor pertanian, kehutanan, energy dan tambang dan pada sektor lainnya. Semua bidang ini memiliki peran besar dalam perubahan iklim dan aksi iklim. Celah korupsi di sektor pangan sangat luas yang dapat berupa penyelewengan anggaran,

panjangnya rangkaian produksi dari petani ke konsumen, penyelewengan subsidi pemerintah ke petani serta manipulasi bibit dan pupuk (Jawapos, 28.12.2020).

Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang dan izin dalam pengalihfungsian lahan telah memberikan dampak sosial dan iklim yang buruk. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Prilyscia, Sutarno dan Rahayu pada tahun 2018 tentang korelasi antara konversi lahan dan produktivitas pertanian. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyer tersebut menemukan bahwa telah terjadi pengurangan lahan sawah sejak tahun 2006 – 2009 yang disebabkan pengalihan fungsi lahan untuk alokasi perumahan, industri, pembuatan jalan-jalan penunjang untuk akses penduduk telah mengakibatkan kekeringan dan kehilangan produktivitas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Kekeringan tentu akan memberi dampak pada strategi produksi, hasil panen, keuntungan ekonomi yang didapat dan dampak kesehatan pada masyarakat sekitar serta kemungkinan migrasi penduduk ke wilayah lain. Dan perbaikan terhadap kondisi iklim panas dan kering tentu sangat sulit dilakukan dalam waktu yang sebentar. Kondisi lingkungan yang tidak akomodatif akan memiliki dampak terhadap daya tarik masyarakat khususnya para pemuda untuk melanjutkan usaha pertanian di wilayah kecamatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa aparat daerah, masyarakat dan pengusaha belum memperhitungkan pembangunan keberlanjutan dan memikirkan keadilan pembangunan bagi semua.

Dengan demikian, usaha menyadarkan dan meningkatkan pengetahuan ASN dan masyarakat tentang perubahan iklim adalah hal yang sangat *imperative*. Mengingat Indonesia merupakan negara ke-4 di dunia yang memiliki penduduk terbanyak sekitar 255 juta jiwa. Perubahan iklim yang ditandai dengan hujan terus menerus di beberapa wilayah, banjir, tanah longsor dan meletusnya gunung merapi sejak Januari 2020 menjadi peringatan yang sangat kuat bagi kita ASN untuk melakukan aksi iklim lewat kebijakan, perencanaan dan implementasi pembangunan hijau segera. Sebuah studi menyatakan bahwa biaya yang akan dikeluarkan Indonesia di 2050 yang disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi di sektor pertanian, kesehatan dan peningkatan permukaan air laut diperkirakan mencapai 132 triliun rupiah (UNDP Indonesia, 11.11.2020). Tidak hanya biaya dalam bentuk finansial, kerugian-kerugian nonfinansial lain yang belum diukur seperti perkembangan dan pertumbuhan sumber daya SDM dan budaya sangatlah besar.

Oleh sebab itu, penanganan perubahan iklim seperti yang telah ditetapkan dalam tujuan 13 dari SDGs sangat memerlukan target-target dan tindakan terencana, aplikatif dan terukur yang dilakukan secara konsolidatif, koordinatif dan terintegrasi. Beberapa target kunci yang harus segera

direalisasikan adalah: 1) memperkuat kapasitas ketahanan dan kemampuan adaptasi kita terhadap iklim dan bencana alam; 2) mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional dan 3) meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak perubahan iklim (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Selaras dengan Alisjahbana dan Murniningtyas, SDFINANCE.UNDP.ORG menyatakan bahwa aksi iklim merupakan usaha yang harus ditingkatkan untuk mengurangi emisi gas dan memperkuat daya tahan dan kemampuan adaptif kita terhadap dampak perubahan yang terjadi. Usaha ini dapat berbentuk pengintegrasian inisiatif dan langkah-langkah perubahan iklim dalam kebijakan nasional, peningkatan kesadaran melalui program-program pelatihan dan pendidikan tentang perubahan iklim, memperkuat kapasitas institusi dan pegawai terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Peran Lembaga Pelatihan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Jeffrey Sachs, direktur dari Sustainable Development Solutions Network menyatakan bahwa untuk menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan maka pendidikan adalah hal yang harus dilakukan dimana setiap orang dari usia muda telah diberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mempromosikan beberapa poin penting terkait pembangunan berkelanjutan, gaya hidup yang berkelanjutan, hak azasi manusia, bagaimana menjadi warga dunia yang baik, kesetaraan gender, kemampuan untuk menghargai keragaman budaya dan berkontribusi terhadap keberlanjutan kehidupan. Sedangkan program pelatihan diperlukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan untuk memberikan solusi nyata dalam pembangunan berkelanjutan. Mencermati tujuan 13 dari TPB, untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya dengan ada 3 target utama yang dilakukan: 1) menguatkan daya tahan dan kapasitas (individu dan lembaga) melakukan adaptasi terhadap bahaya yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam; 2) mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional; dan 3) memperbaiki pendidikan, penyadaran, kapasitas manusia dan institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini. Semua sektor/kementerian/lembaga/pemerintah daerah (Pemda) harus berkontribusi dan berperan aktif, namun sektor prioritas seperti transportasi, industri, pertanian, kehutanan, energi, pendidikan,

keuangan dan perencanaan pembangunan harus berada di garda terdepan untuk menjahit dan mewujudkan target-target yang telah ditetapkan. Semua sektor/lembaga/Pemda dapat memanfaatkan lembaga Pelatihan yang ada saat ini untuk menjadi mesin perubahan perubahan iklim yang diharapkan. Lembaga Pelatihan akan dapat merancang program-program strategis yang terstruktur dengan hasil belajar yang dapat diukur. Lembaga pelatihan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam merancang proses belajar yang sesuai dengan melibatkan tenaga pengajar dan ahli yang sesuai.

Hadirnya sekitar 719 lembaga pelatihan, 2.136 universitas, 5.075 Widyaiswara, 76.149 dosen, 1.451.591 guru ditambah lagi ribuan penyuluh di sektor pertanian, kehutanan dan kesehatan merupakan modal utama dalam proses pendidikan dan pelatihan tentang perubahan iklim. Selain itu, asset lain yang dapat dimanfaatkan adalah keberadaan penggiat perubahan iklim baik individu dan kolektif dan lembaga swadaya masyarakat perubahan iklim yang cukup banyak jumlahnya yang telah bergerak untuk menyadarkan publik tentang perubahan iklim dan dampaknya dan telah memberikan solusi-solusi inovatif dalam menangani perubahan iklim. Keberadaan lembaga dan orang-orang ini sangatlah diperlukan sebagai mitra kerja mengingat bahwa kerangka kerja dalam pembangunan berkelanjutan khususnya dalam penanganan perubahan iklim menggunakan 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*). Masalah yang kita hadapi adalah bagaimana menyatukan orang-orang dan mengintegrasikan semua inisiatif, pengetahuan dan aksi yang sudah dilakukan sehingga menjadi aksi bersama untuk melakukan aksi penyadaran, peningkatan ketrampilan dalam meningkatkan kapasitas pegawai dan lembaga yang ada terkait perubahan iklim. Ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan terkait Perubahan Iklim. Pertama- menyelenggarakan program-program penyadaran dan pengembangan kompetensi perubahan iklim. Perlu dilakukan pemetaan program-program yang sudah berjalan di berbagai lembaga dan universitas saat ini. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 2016 telah melakukan edukasi dan mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi hijau melalui beberapa kegiatan pelatihan bekerjasama dengan Global Green Growth Institute Indonesia (GGGI). Dan mencapai momentum dengan terbitnya Keputusan Kepala LAN No. 704/K.1/HKM.02.2/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kurikulum pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi pemikiran antara LAN, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan GGGI. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian terkait lainnya tentu telah memiliki program-program

yang memiliki tujuan penyadaran dan peningkatan kompetensi terkait pembangunan berkelanjutan. Kedua, lembaga pelatihan mengembangkan model penyelenggaraan yang ramah lingkungan dimana preservasi dan konservasi lingkungan dapat dilakukan dalam pengelolaan programnya. Dan terakhir, menjadi model lembaga pelatihan hijau dengan menerapkan pengelolaan dan penyelenggaraan yang ramah lingkungan dan ramah sosial.

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan dan penyelenggaraan lembaga pelatihan saat ini. Pendekatan baru tersebut perlu mendeteksi kebutuhan nasional saat ini untuk dapat mencapai target-target Agenda 2030. Artinya peran lembaga pelatihan akan menjadi *media/tool* percepatan pencapaian TPB. Melakukan integrasi nasional untuk melihat target peserta kunci dalam kepesertaan pelatihan. Menyusun bank data ahli dan *best practices* sebagai salah satu sumber belajar dalam program pelatihan. Tak kalah pentingnya membangun jejaring kerja nasional dalam penyelenggaraan program-program pelatihan. Selanjutnya, lembaga pelatihan dapat mengembangkan inovasi metode pembelajaran yang beragam terkait penyadaran perubahan iklim. Kehadiran teknologi telah memudahkan penyebaran pengetahuan dalam waktu yang tak terbatas, jangkauan wilayah yang lebih ekstensif dan dalam jumlah orang yang lebih banyak.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga pelatihan dalam menyelenggarakan program-program perubahan iklim: 1) kemampuan melakukan adaptasi dan orientasi baru program pelatihan. Sangat diperlukan setiap lembaga pelatihan di pusat dan daerah untuk melihat kebutuhan program pelatihan yang strategis terkait perubahan iklim. Saat ini pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan manajerial telah menjadi fokus banyak lembaga pelatihan sehingga pemahaman dan ketrampilan dalam merancang program teknis lain seperti perubahan iklim masih terbatas; 2) menjamin pelibatan tenaga pengajar luar yang dapat membantu mengembangkan program dan membantu proses transfer pengetahuan kepada tenaga pengajar lain; 3) mempercepat adaptabilitas tenaga pengajar internal untuk cepat merespons pengetahuan baru tentang perubahan iklim dan mampu mentransfernya kepada target peserta; 4) literasi teknologi untuk mendukung model pembelajaran dan cara belajar yang efisien dan ramah lingkungan. Meski teknologi dalam pembelajaran dirasakan sebagai *enabler* bukan *substitutes* (pengganti) manusia (Jayati Ghosh dalam UN Recover Better, 2020), namun teknologi telah membantu lembaga pelatihan dan manusia secara umum dalam menjalankan kinerja dan kehidupannya dalam memberikan pelayanan terbaiknya bagi kemaslahatan manusia lainnya.; dan 5) membangun jejaring

dan budaya kolaborasi dalam mengembangkan program-program pelatihan terkait perubahan iklim.

Tak dapat dielak bahwa lembaga pelatihan baik di Pusat dan di Daerah memiliki peran strategis untuk membangun kolase sumber-sumber daya yang ada sehingga dapat menjadikan lembaga dan aktor pendidik dan pelatih dan penggiat dapat berjalan bersama membantu menyelesaikan isu perubahan iklim. Kolaborasi-kolabarasi antar lembaga pemerintah, sektor privat dan masyarakat dapat dirancang secara sistemik dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan serta riset.

III. Kesimpulan dan Saran

Perubahan iklim adalah perubahan iklim yang signifikan terhadap iklim, suhu udara dan curah hujan. Perubahan ini terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas lainnya pada atmosfer. Konsentrasi gas rumah kaca dapat diakibatkan oleh proses alam, namun saat ini aktivitas manusia lebih banyak berkontribusi terhadap efek gas rumah kaca ini dari penggunaan energi fosil yang tinggi, perubahan fungsi lahan, sampah, serta kegiatan industryisejak modernisasi lewat fase-fase industri terjadi. Oleh sebab itu sejak abad 16 sampai sekarang, isu keseimbangan pembangunan dengan memperhatikan pilar ekonomi, lingkungan dan sosial dalam rangka keberlanjutan pembangunan terus bergulir. Diperlukan aksi dari semua negara, orang dan institusi untuk dapat mengatasi perubahan iklim melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi yang terpadu.

ASN dan Lembaga Pelatihan merupakan aktor penting untuk dapat merealisasikan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan hijau atau rendah karbon. ASN memiliki peran penting karena mereka terlibat dalam perencanaan, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public. Sedangkan lembaga pelatihan, selain sebagai insturmen juga aktor dalam melakukan penyadaran dan peningkatan kapasitas ASN dan masyarakat terkait perubahan iklim dan aksi iklim. Pemetaan terhadap kebutuhan program pelatihan dan target kunci peserta, penyelenggaraan program-program secara terencana dan terintegrasi sangat diperlukan, orientasi program-program ke depan dengan melihat tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya tujuan untuk memerangi perubahan iklim dan pelibatan berbagai sektor sangatlah diperlukan.

Daftar Pustaka

Alisjahbana, Armida Salsiah & Murniningtyas, Endah. (2018) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Unpad Press, Bandung

Bappenas. (2019) Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight

Mas'at, Ali. (2009) Efek Pengembangan Perkotaan terhadap Kenaikan Suhu Udara di Wilayah DKI Jakarta, Pusdatin Klimatologi dan Kualitas Udara, BMKG

Meiviana, Armely, Sulistiowati Diah R dan Soejachmoen, Moekti H. (2004) Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia, Pelangi

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 704/K.1/HKM.02.2/2019

Prilyscia, A, Sutarno, Rahayu. 2018. Hubungan Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Iklim Terhadap Hasil Komoditas Pertanian di Jumanto, Agrotech Res J. Volume 2, No. 1.

United Nations. (2020) Report of the UN Economist Network for 75th Anniversary: Shaping the Trends of Our Time, United Nations

United Nations. (2020) Recover Better: Economic and Social Challenges and Opportunities, United Nations

United States Environmental Protection Agency. (2009) Sustainable Materials Management: The Road Ahead, EPA

Woodward, John. (2008) Eyewitness Climate Change: Discover How Global Warming Is Changing Our Planet, and What We Can Do To Fight Back, DK Publishing, USA

<https://www.liputan6.com/bisnis>, 24 desember 2020

<https://sdgacademylibrary.mediaspace.kaltura.com>

<https://www.kompas.tv/article/124895/seberapa-besar-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-lingkungan>

<https://news.okezone.com/read/2020/12/11/18/2326047/akibat-pandemi-covid-19-emisi-gas-rumah-kaca-turun-drastis-sepanjang-sejarah>

https://www.recoveryplatform.org/assets/tools_guidelines/GFDRR

<https://economy.okezone.com/read/2020/02/09/20/2165794/fakta-fakta-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-tahun-2019>

<https://indomaritim.id/ketimpangan-sosial-pengertian-dan-penyebabnya>

<https://koransulindo.com/perubahan-iklim-keadilan-dan-ketimpangan-ekologi>

<https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/sektor-pertanian-rawan-korupsi>

<https://www.undp.org/content/undp/en/home/stories/pioneering-the-green-sukok-in-indonesia>

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/21-tujuan-tigabelas>

<https://www.sdfinance.undp.org>